



RILIS SURVEI OPINI ELIT

“Koperasi, RUU P2SK, dan Implikasinya”

Temuan Survei 22 – 28 November 2022

Pengantar

Koperasi adalah pendekatan ekonomi berbasis kolektif dan kekeluargaan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi mempunyai peran dan manfaat yang sangat besar bagi perekonomian bangsa selain berdampak positif juga dalam memberi akses kepada para pihak terkait.

Di dalam perkembangan lebih lanjut, Pemerintah berencana mereformasi Koperasi melalui Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) dengan tujuannya untuk pemberdayaan Koperasi dan perlindungan konsumen, agar Koperasi berjalan semakin efisien dan kredibel sehingga persoalan yang muncul kelak tetap terkendali dalam kerangka pengawasan yang terukur. Dengan RUU P2SK ini, fungsi pengawasan Koperasi yang saat ini berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kemenkop dan UMKM) akan berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pro kontra bermunculan menanggapi rencana Pemerintah tersebut, terutama karena hal tersebut dirasa mencederai asas dan semangat Koperasi yang tercantum dalam UUD 1945 dimana Koperasi dibangun dari semangat gotong royong dan kekeluargaan. Pasal-pasal dalam RUU P2SK yang mengatur tentang Koperasi juga dianggap bertentangan dengan Landasan Idiil (Pancasila sila ke-5 dan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1) dan Landasan Mental (UU No. 25 Tahun 1992) dari Koperasi.



Latar Belakang Survei Elite

Untuk menindaklanjuti isu yang berkembang dan memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dan memastikan keberlanjutan Koperasi berjalan dengan sebagaimana mestinya dan berkembang lebih baik lagi, kita perlu untuk memasukkan pertimbangan partisipatoris dalam mengelola perkembangan Koperasi ke depan.

Dalam hal ini, termasuk memahami pengetahuan, pemahaman, harapan, keinginan, hal-hal yang disetujui dan tidak disetujui oleh para pelaku Koperasi dan pengamat perkoperasian terkait sistem Koperasi yang ideal di Indonesia, dan terkait RUU P2SK, khususnya terkait poin yang menyatakan bahwa OJK ditugaskan untuk mengawal Koperasi.

Melalui survei elite ini, diharapkan kita dapat bersama-sama mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan mengetahui cara terbaik dalam membangun sistem perkoperasian di Indonesia, khususnya terkait lembaga yang bertugas mengawasi Koperasi.



Tujuan Survei Elite

Survei elite tentang “Koperasi, RUU P2SK, dan Implikasinya” memiliki tiga tujuan:

01

Mengevaluasi eksistensi Koperasi dalam opini dan persepsi elit

02

Mengevaluasi opini dan persepsi elit dalam proses penyusunan dan sosialisasi Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK)

03

Mengevaluasi dampak RUU P2SK seandainya telah berlaku efektif bagi insan perkoperasian di Indonesia

Metodologi Survei Elite

Responden survei ini adalah pemuka opini dari tingkat nasional dan daerah (provinsi), sebanyak **155 orang** yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka terdiri dari tokoh yang memiliki informasi lebih luas dibandingkan masyarakat umum tentang Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) Di antara mereka adalah akademisi (yang menjadi rujukan media), praktisi/pegawai koperasi, dan tokoh masyarakat koperasi.

Karena tidak tersedianya data populasi pemuka opini, maka pemilihan responden tidak dilakukan secara random. Pemilihan responden dilakukan secara purposif, terutama dicari dari media massa nasional atau daerah dan jumlahnya sudah ditetapkan. Oleh karena itu, hasil survei ini lebih mencerminkan penilaian responden, dan bukan populasi seluruh pemuka opini di Indonesia. Namun karena jumlah responden survei ini cukup banyak dan terdiri dari pemuka opini yang sering menjadi rujukan, maka hasil survei ini cukup menyuarakan penilaian pemuka opini pada umumnya.

Pertanyaan kuesioner survei secara garis besar dibagi menjadi dua. Pertama, pertanyaan semi terbuka untuk mengetahui agregasi persepsi para pakar/pemuka opini terhadap isu-isu Koperasi dan RUU P2SK. Kedua, pertanyaan terbuka untuk menilai persepsi para pakar/pemuka opini terhadap RUU P2SK dan dampaknya.

Pengambilan data untuk kegiatan survei ini dilakukan pada tanggal 22 – 28 November 2022 secara tatap muka dan telepon



Daftar Narasumber

Praktisi

No	Nama	Jabatan	Lembaga	Area
1	Dominikus Wara	Ketua Koperasi	CU SERVIAM KUPANG	Luar Jabodetabek
2	Imam Mutowali	Ketua Koperasi	KSPPS BMT NURUL ISLAM	Luar Jabodetabek
3	justinus tamba	Ketua Koperasi	Pusat koperasi Sumatera timur Skd, CU. Mandiri.	Luar Jabodetabek
4	Frans Meroga Panggabean	Ketua Koperasi	Koperasi Simpan Pinjam Nasari	Jabodetabek
5	Yasir kholidi	Ketua Koperasi	Bmt al_ hikmah semesta	Luar Jabodetabek
6	Ruswanto	Ketua Koperasi	Kspps ahmad dahlhan	Luar Jabodetabek
7	Pepi januar	Ketua Koperasi	Khoiru ummah	Jabodetabek
8	Erni Ratnani	Ketua Koperasi	KSPPS BMT Bina Umat Mandiri	Luar Jabodetabek
9	Ali Hamdan	Ketua Koperasi	Pusat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Umat Terpadu Jawa Timur	Luar Jabodetabek
10	husnul fahmi	Ketua Koperasi	Kspps Bmt Gumarang akbar	Luar Jabodetabek
11	Imam	Ketua Koperasi	Koperasi Nurul Islam Batam	Luar Jabodetabek
12	Alfi imra	Ketua Koperasi	Kspps bmt Amanah Ummat	Luar Jabodetabek
13	Juju zuhroh	Ketua Koperasi	Kspps bmt mitra khusnul aulia sejahtera	Luar Jabodetabek
14	Sutrisna, S.Pd, SH	Ketua Koperasi	KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA	Luar Jabodetabek
15	KAMARUDDIN BATUBARA	Ketua Koperasi	KSPPS BENTENG MIKRO INDONESIA	Jabodetabek
16	Ali masykur	Ketua Koperasi	Kspps bmt fajar bina sejahteta	Luar Jabodetabek
17	Sugiarto	Ketua Koperasi	Al halim madani temanggung	Luar Jabodetabek
18	Mursida rambe	Ketua Koperasi	Kspps bringharjo	Luar Jabodetabek
19	Suprihatin	Ketua Koperasi	KSPPS MITRA MANDIRI	Luar Jabodetabek
20	S Masiun	Ketua Koperasi	KSP CU Keling Kumang	Luar Jabodetabek

*Daftar narasumber yang bersedia dipublikasikan namanya

Daftar Narasumber

Praktisi

No	Nama	Jabatan	Lembaga	Area
21	Rif'an	Pengurus Koperasi	Kspps bmt harapan bersama kalingga	Luar Jabodetabek
22	Ati kartikasari	Pengurus Koperasi	Bondo ben tumoto	Luar Jabodetabek
23	Abdul majid	Pengurus Koperasi	Kspps ugt sidogiri pasuruan	Luar Jabodetabek
24	Ahmad kianto	Pengurus Koperasi	Al Karomah	Luar Jabodetabek
25	SUTARTO	Pengurus Koperasi	KSPPS DIRGANTARA MITRA SEJAHTERA	Luar Jabodetabek
26	Budi Harjo	Pengurus Koperasi	Kspps positama arta sejahtera	Luar Jabodetabek
27	Lalu Suherman Hadi	Pengurus Koperasi	KSPPS BMT AL HIDAYAH UMMAT SEJAHTERA	Luar Jabodetabek
28	Edi Purwanto	Pengurus Koperasi	KSPPS NURURROHMAH AL BAROKAH	Luar Jabodetabek
29	Lilik ismurtanto	Pengurus Koperasi	Amal muslim	Luar Jabodetabek
30	Tommy Prianto	Pengurus Koperasi	Koperasi simpan pinjam Kodanua	Jabodetabek
31	Sudirman Agus	Pengurus Koperasi	Koperasi Jasa Syariah Rizky Amanah Jaya Jawa Timur	Luar Jabodetabek
32	Rena Bangun Luhur	Pengurus Koperasi	Tamzis Bina Utama	Luar Jabodetabek
33	MARLINA	Pengurus Koperasi	CENTER KUBE	Luar Jabodetabek
34	Abdani, SE, M.Si	Pengurus Koperasi	KSPPS BMT SURYA MADANI	Luar Jabodetabek
35	Supadin	Pengurus Koperasi	BMT Assyafiyah Berkah Nasional	Luar Jabodetabek
36	CHOERUS SALEH	Pengurus Koperasi	KSPPS BMT HIRA	Luar Jabodetabek
37	Rama widiasenthot	Pengurus Koperasi	Kspps bmt al ikhwan	Luar Jabodetabek
38	Bambang Haryanto	Pengurus Koperasi	KSPPS BMT PrimaDinar	Luar Jabodetabek
39	indah purnomowati	Pengurus Koperasi	KPPS BMT Surya Abadi Riyanto	Luar Jabodetabek
40	Vincentius Repu, S. E, MSc. AGr	Pengurus Koperasi	KOOPERASI KREDIT ADIGUNA KUPANG, dan PUSAT KOPERASI KREDIT TIMOR, KUPANG, NTT	Luar Jabodetabek
41	widodo	Pengurus Koperasi	KSPPS ANDA	Luar Jabodetabek
42	MULYOTO	Pengurus Koperasi	KSPPS Bina Insan Mandiri	Luar Jabodetabek
43	Emi retnani	Pengurus Koperasi	Emi Retmami	Luar Jabodetabek
44	Wedy Sarwono	Pengurus Koperasi	Kspps bmt Amanah Indonesia	Luar Jabodetabek
45	Eko Purnomo	Pengurus Koperasi	KSPPS BMT MELATI	Luar Jabodetabek
46	Diah Fajar Astuti	Pengurus Koperasi	KSPPS Bina Niaga Utama	Luar Jabodetabek
47	Sunaryo	Pengurus Koperasi	Bmt mitra usaha mandiri	Luar Jabodetabek
48	Anang Mahmudi	Pengurus Koperasi	Koperasi Syariah BMT Artha Insani Banyuwangi	Luar Jabodetabek
49	Saputra Mansur	Pengurus Koperasi	KSPPS BMT Indragiri	Luar Jabodetabek

*Daftar narasumber yang bersedia dipublikasikan namanya

Daftar Narasumber

Pengamat/Pakar/Akademisi

No	Nama	Jabatan	Lembaga	Area
50	wardah hafidz	Akademisi/aktivis/pengamat Koperasi	Urban Poor Consortium (UPC)	Jabodetabek
51	I Wayan Sukadana	Akademisi/aktivis/pengamat Koperasi	Universitas Udayana	Luar Jabodetabek
52	Stephanus Toga Siagian	Akademisi/aktivis/pengamat Koperasi	Inkopdit	Jabodetabek
53	Torang Manurung	Akademisi/aktivis/pengamat Koperasi	PAKAR HUKUM KOPERASI/DOKTER HUKUM KOPERASI	Luar Jabodetabek
54	Indah	Akademisi/aktivis/pengamat Koperasi	Kspps Umat Sejahtera Mulia	Luar Jabodetabek
55	A. Marhaendratno	Akademisi/aktivis/pengamat Koperasi	Kspps bmt karisma	Luar Jabodetabek
56	Dwi Mahroji	Akademisi/aktivis/pengamat Koperasi	STIMA IMMI	Jabodetabek
57	Darwin Damanik	Akademisi/aktivis/pengamat Koperasi	Universitas Simalungun	Luar Jabodetabek
58	Hendri Tanjung, Ph.D	Akademisi/aktivis/pengamat Koperasi	Universitas Ibn Khaldun Bogor	Jabodetabek
59	Prof,Dr Ahmad Rofiq	Akademisi/aktivis/pengamat Koperasi	Kspps damar	Luar Jabodetabek
60	Purwoko	Akademisi/aktivis/pengamat Koperasi	Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta	Luar Jabodetabek
61	Novat Pugo Sambodo	Akademisi/aktivis/pengamat Koperasi	PKEBS FEB UGM	Luar Jabodetabek

*Daftar narasumber yang bersedia dipublikasikan namanya

KONDISI UMUM KOPERASI

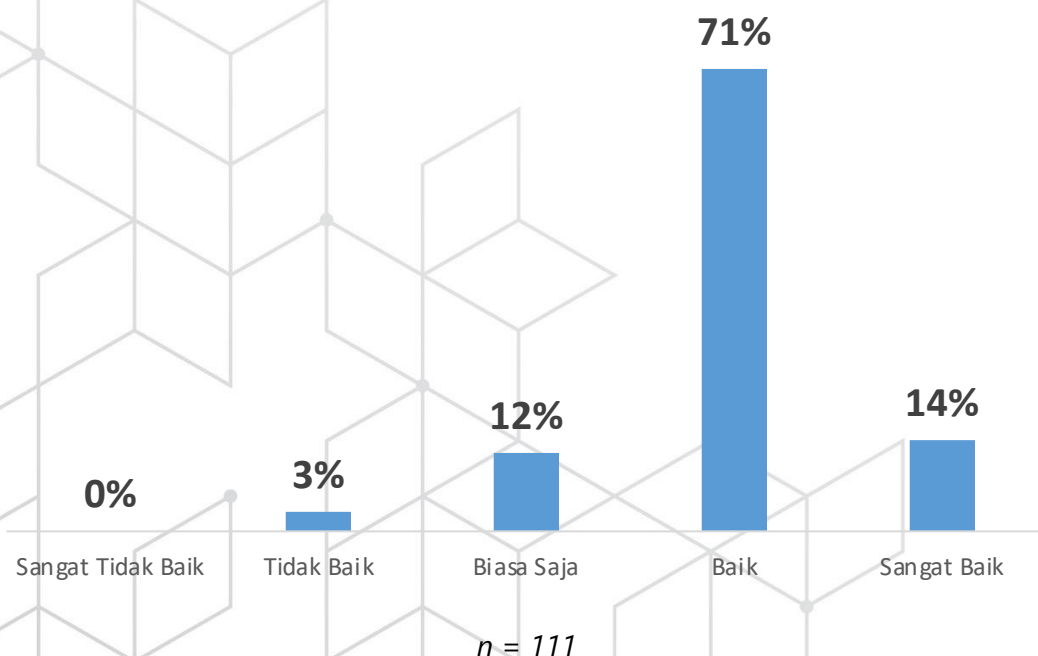


Kondisi dan situasi Koperasi

Pada umumnya para Ketua dan Pengurus Koperasi memiliki pandangan yang lebih positif terhadap kondisi dan situasi Koperasi dalam 1 tahun terakhir dibandingkan dengan para Pengamat/Akademisi.

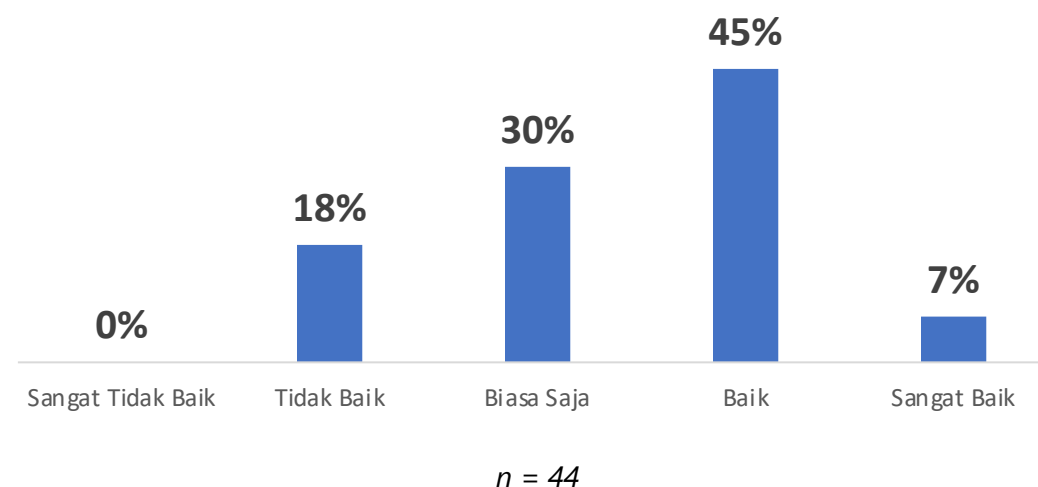
Praktisi

"Bagaimanakah kondisi dan situasi Koperasi Anda dalam 1 tahun terakhir?"



Pengamat

"Bagaimanakah kondisi dan situasi kinerja Koperasi secara umum dalam 1 tahun terakhir?"



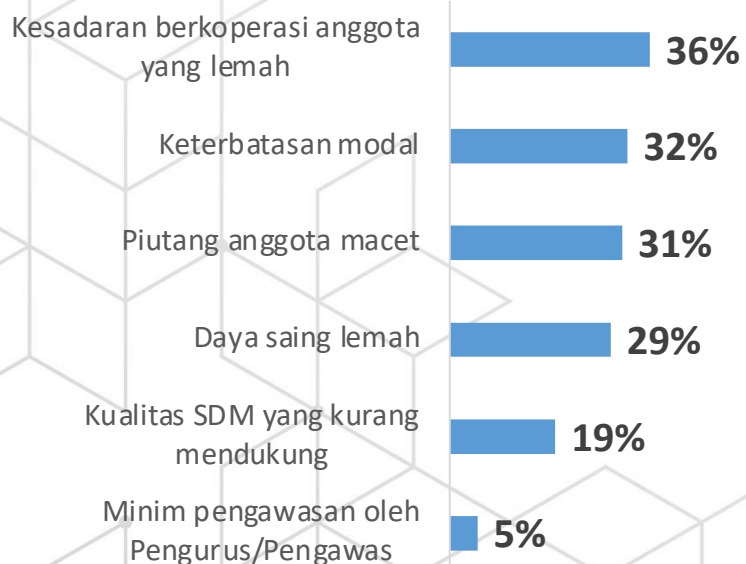
*Pertanyaan *single choice*: responden hanya dapat memilih satu opsi jawaban

Kendala yang dihadapi Koperasi

Walaupun terdapat perbedaan cara pandang dalam melihat kendala yang dihadapi dari sisi praktisi dan pengamat, namun **minimnya pengawasan** dilihat sebagai **kendala yang paling minim** oleh kedua belah pihak

Praktisi

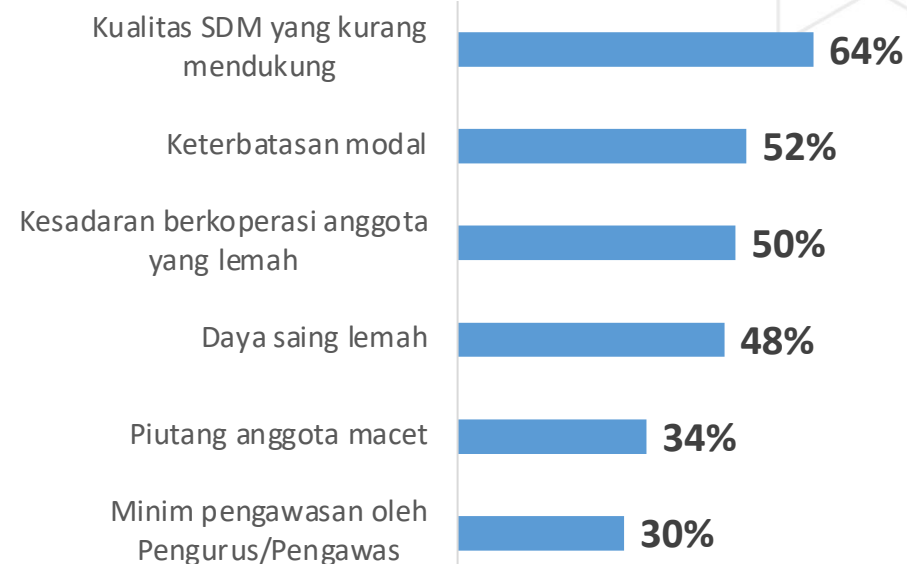
"Kendala apa saja yang Anda hadapi pada Koperasi Anda dalam 1 tahun terakhir?"



n = 111

Pengamat

"Kendala apa saja yang menurut Anda dihadapi oleh pelaku Koperasi dalam 1 tahun terakhir?"



n = 44

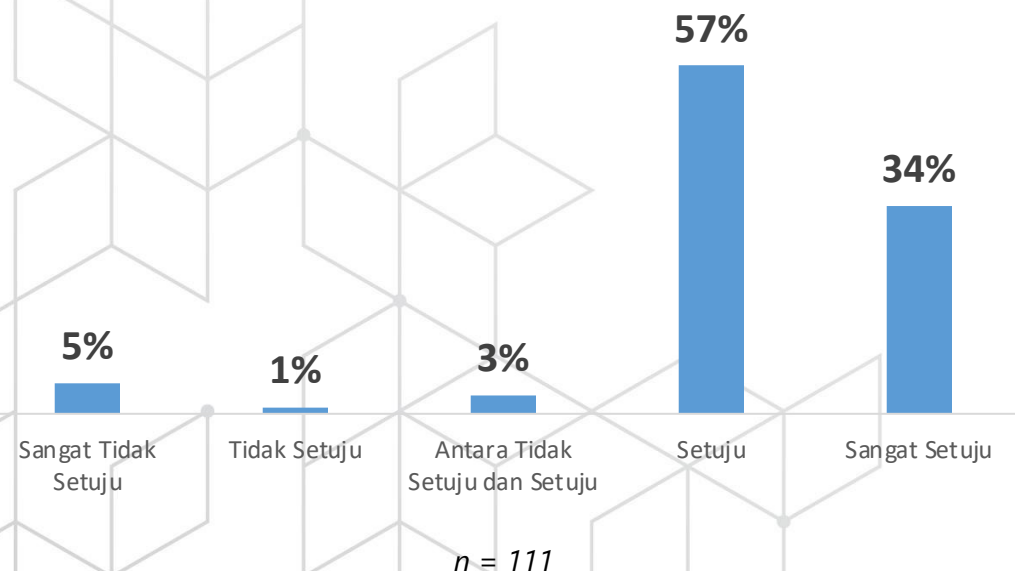
*Pertanyaan *multiple choice*: responden dapat memilih lebih dari satu opsi jawaban

Persepsi tata kelola Koperasi

Secara umum, mayoritas praktisi dan pengamat menilai dalam 1 tahun terakhir ini Koperasi sudah dijalankan dengan tata kelola yang baik, dengan praktisi memiliki pandangan yang lebih positif

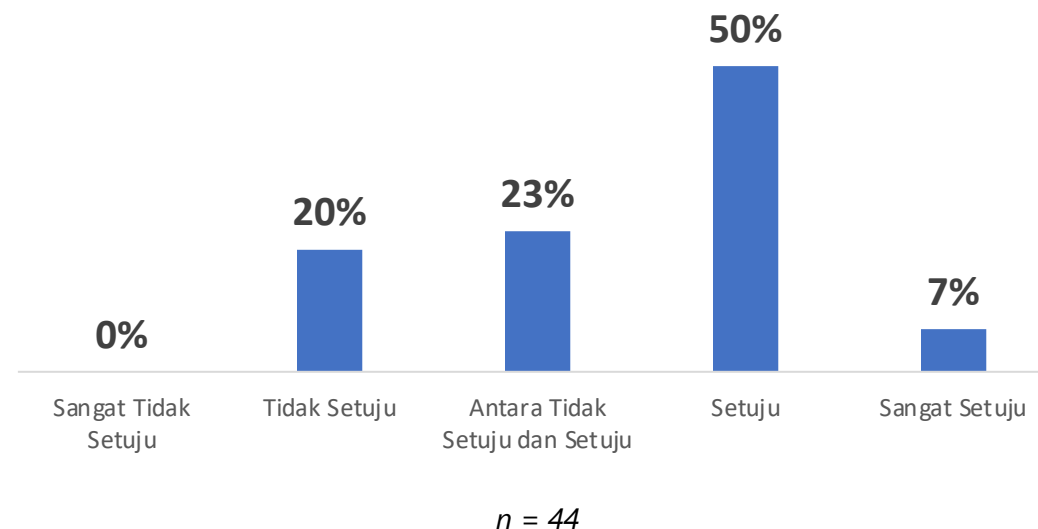
Praktisi

"Seberapa setujuhkah Anda jika dalam 1 tahun terakhir Anda telah menjalankan Koperasi dengan tata kelola yang baik?"



Pengamat

"Seberapa setujuhkah Anda jika dalam 1 tahun terakhir secara umum Koperasi sudah dijalankan dengan tata kelola yang baik?"



*Pertanyaan *single choice*: responden hanya dapat memilih satu opsi jawaban

Faktor untuk meningkatkan kinerja Koperasi

Baik praktisi dan pengamat sepakat bahwa pengetahuan dan keterampilan pengurus Koperasi adalah faktor yang paling penting untuk dapat meningkatkan kinerja Koperasi

"Mohon urutkan faktor-faktor berikut dari yang paling penting hingga paling tidak penting untuk dapat meningkatkan kinerja Koperasi Anda/secara umum"

Praktisi

Paling penting



Pengetahuan dan keterampilan pengurus

Kesadaran berkoperasi anggota

Peran dan kebijakan Pemerintah

Kemudahan permodalan

Paling tidak penting

$n = 111$

Pengamat

Paling penting



Pengetahuan dan keterampilan pengurus

Peran dan kebijakan Pemerintah

Kesadaran berkoperasi anggota

Kemudahan permodalan

Paling tidak penting

$n = 44$

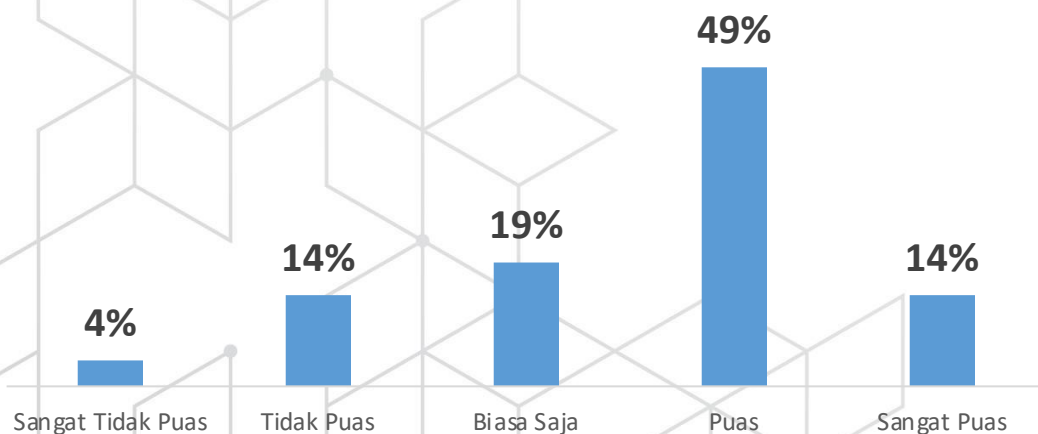
*Pertanyaan dalam format *ranking*: responden diminta mengurutkan opsi jawaban dari yang paling penting ke paling tidak penting

Tingkat kepuasan terhadap peran Pemerintah

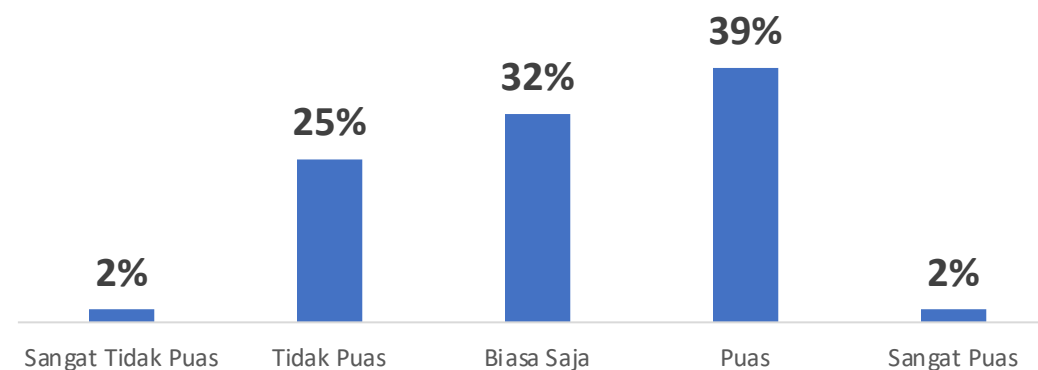
Praktisi mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap peran Pemerintah dalam pengawasan Koperasi dibandingkan dengan pengamat

"Bagaimanakah tingkat kepuasan Anda terhadap peran Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi & UKM sebagai pengawas Koperasi saat ini?"

Praktisi



Pengamat



*Pertanyaan *single choice*: responden hanya dapat memilih satu opsi jawaban

Alasan kepuasan/ketidakpuasan terhadap peran Pemerintah

Kepuasan dan ketidakpuasan didasarkan pada peran Kemenkop & UKM, dimana walaupun mayoritas merasa peran tersebut sudah dijalankan dengan baik namun sebagian yang lain merasa belum optimal

"Apa alasan Anda merasa puas/tidak puas terhadap Kementerian Koperasi & UKM sebagai pengawas Koperasi saat ini?"

Praktisi

Puas

- Kemenkop & UKM telah menjalankan peran dengan baik termasuk di antaranya pengawasan, pendampingan, pembinaan, penilaian, pelatihan dengan secara rutin melakukan penguatan Koperasi dengan program-programnya

Tidak Puas

- Pengawasan dirasakan belum maksimal khususnya terkait Koperasi di daerah-daerah yang merasa belum terjangkau dengan baik dengan program-program.
- Sebagian juga merasakan pengawasan dan pendampingan yang masih sebatas formalitas dan belum maksimal.
- Kurangnya SDM yang berpengaruh terhadap kualitasnya.

Pengamat

Puas

- Sudah berperan dalam memberikan pelatihan, pengawasan, permodalan, dan support termasuk memperhatikan keluhan dan hambatan Koperasi.

Tidak Puas

- Belum ada terobosan atau inovasi baru yang signifikan yang dapat mendorong perkembangan Koperasi lebih untuk dapat lebih pesat lagi. Peran Kemenkop & UKM dirasakan belum optimal karena proses kerja yang cenderung masih sama tanpa ada perkembangan kinerja yang berarti.

PEMAHAMAN FILOSOFI KOPERASI

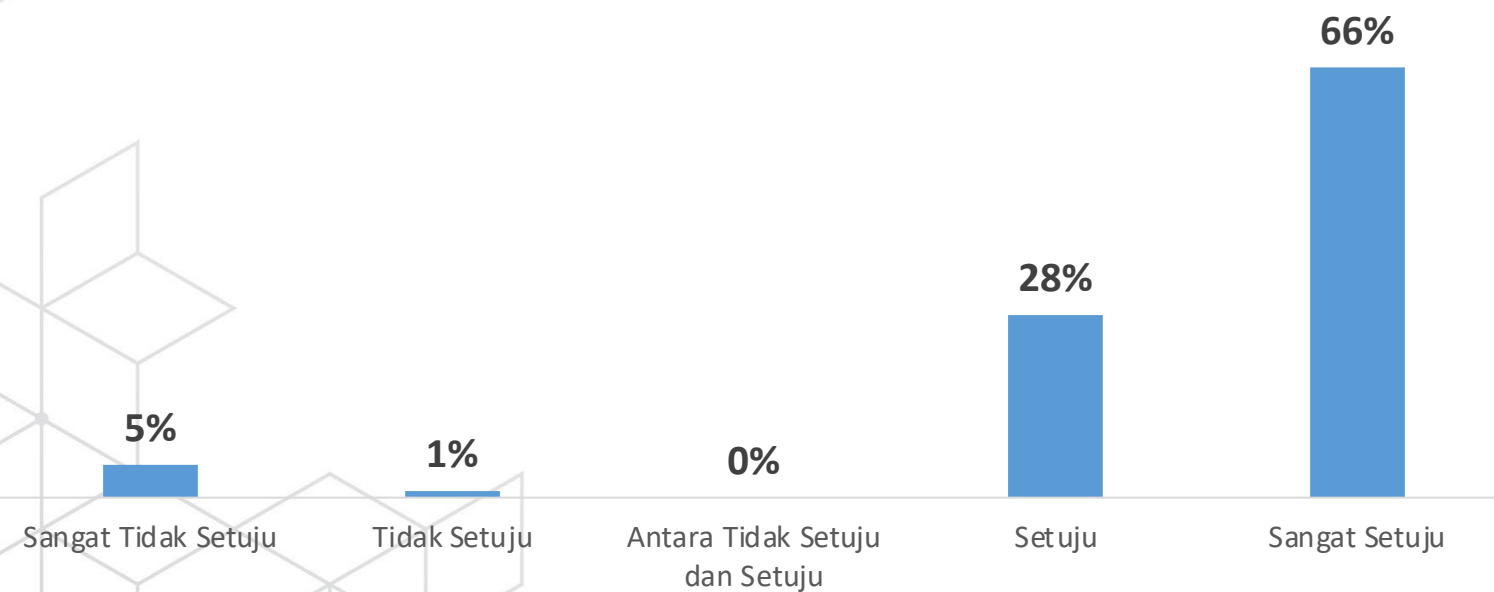


Pemahaman filosofi Koperasi – Keanggotaan

Lebih dari 90% responden menyatakan kesetujuannya terhadap filosofi keanggotaan Koperasi yang bersifat sukarela dan terbuka

“Seberapa setujukah Anda dengan pernyataan berikut mengenai Koperasi?”

Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela (tanpa ada unsur paksaan) dan terbuka (bagi setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan)



$n = 155$

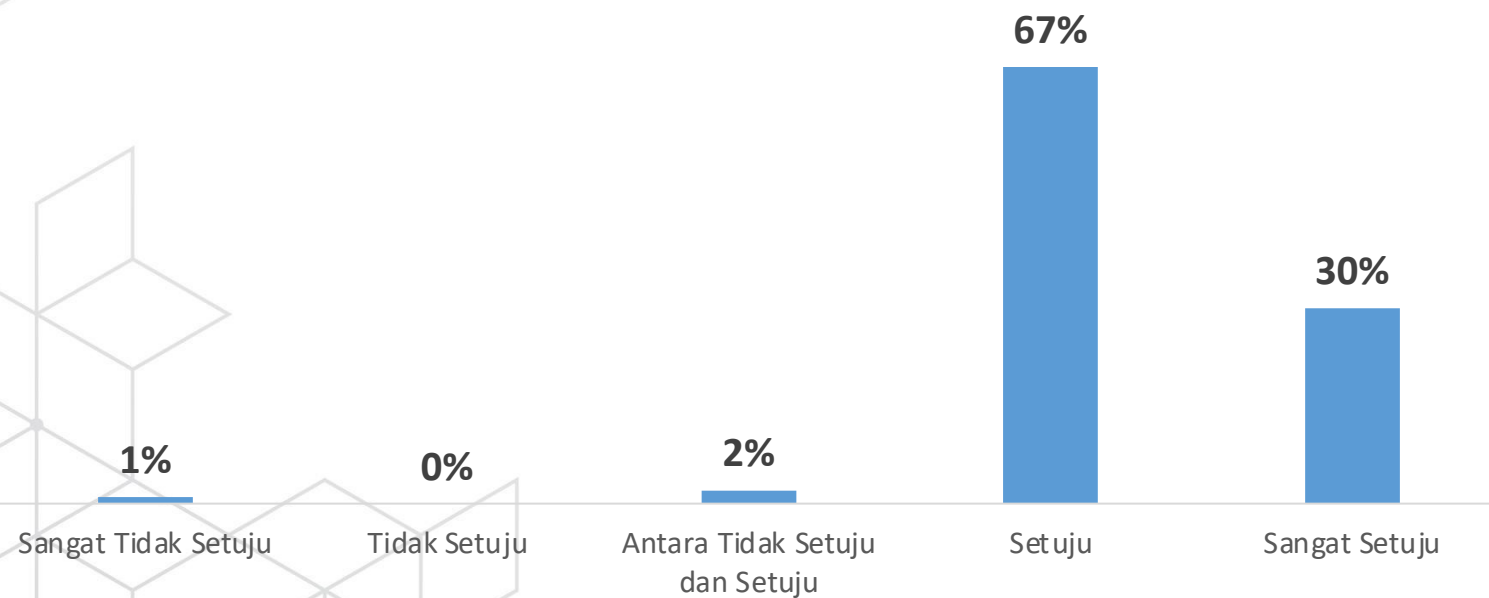
*Pertanyaan *single choice*: responden hanya dapat memilih satu opsi jawaban

Pemahaman filosofi Koperasi – Pengelolaan

Hampir seluruh responden menyatakan kesetujuannya terhadap filosofi pengelolaan Koperasi yang dilakukan secara demokratis

"Seberapa setujuhkah Anda dengan pernyataan berikut mengenai Koperasi?"

Pengelolaan Koperasi dilakukan secara demoratis yang ditetapkan melalui rapat anggota



$n = 155$

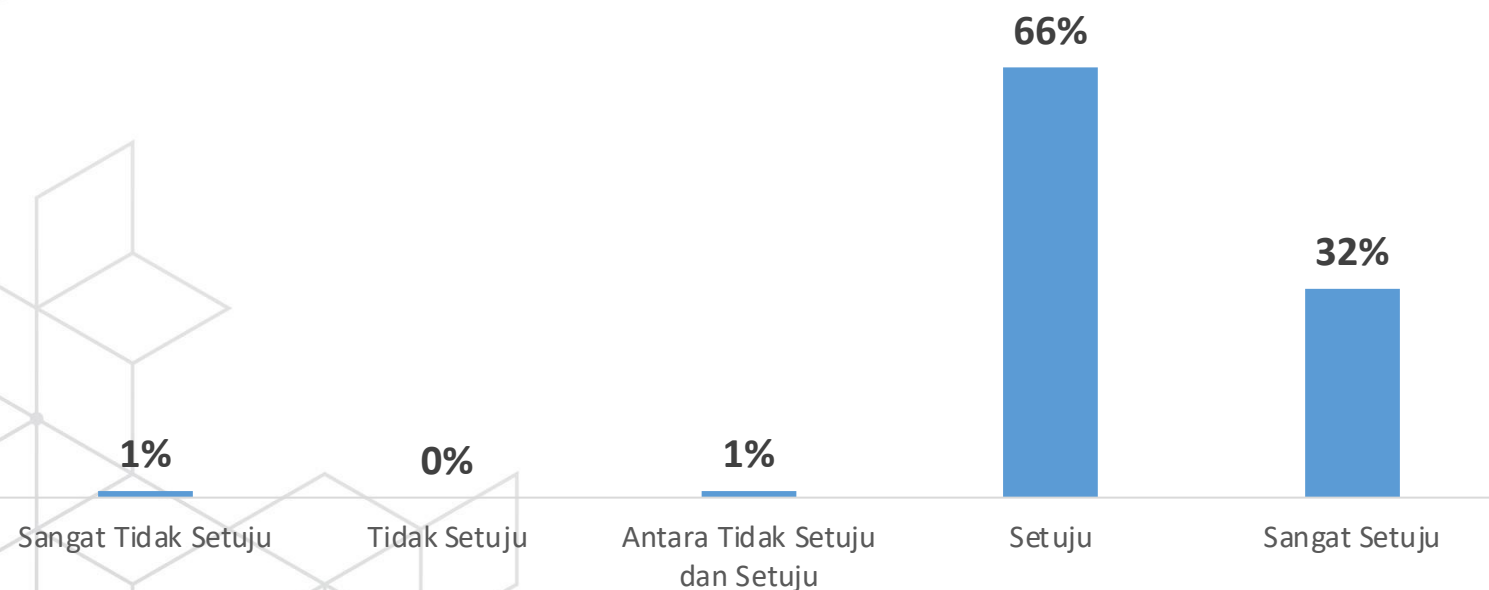
*Pertanyaan *single choice*: responden hanya dapat memilih satu opsi jawaban

Pemahaman filosofi Koperasi – Pembagian SHU

Hampir seluruh responden menyatakan kesetujuannya terhadap filosofi pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi yang dilakukan secara adil berdasarkan jasa usaha masing-masing anggota

"Seberapa setujukah Anda dengan pernyataan berikut mengenai Koperasi?"

Pembagian SHU dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota



$n = 155$

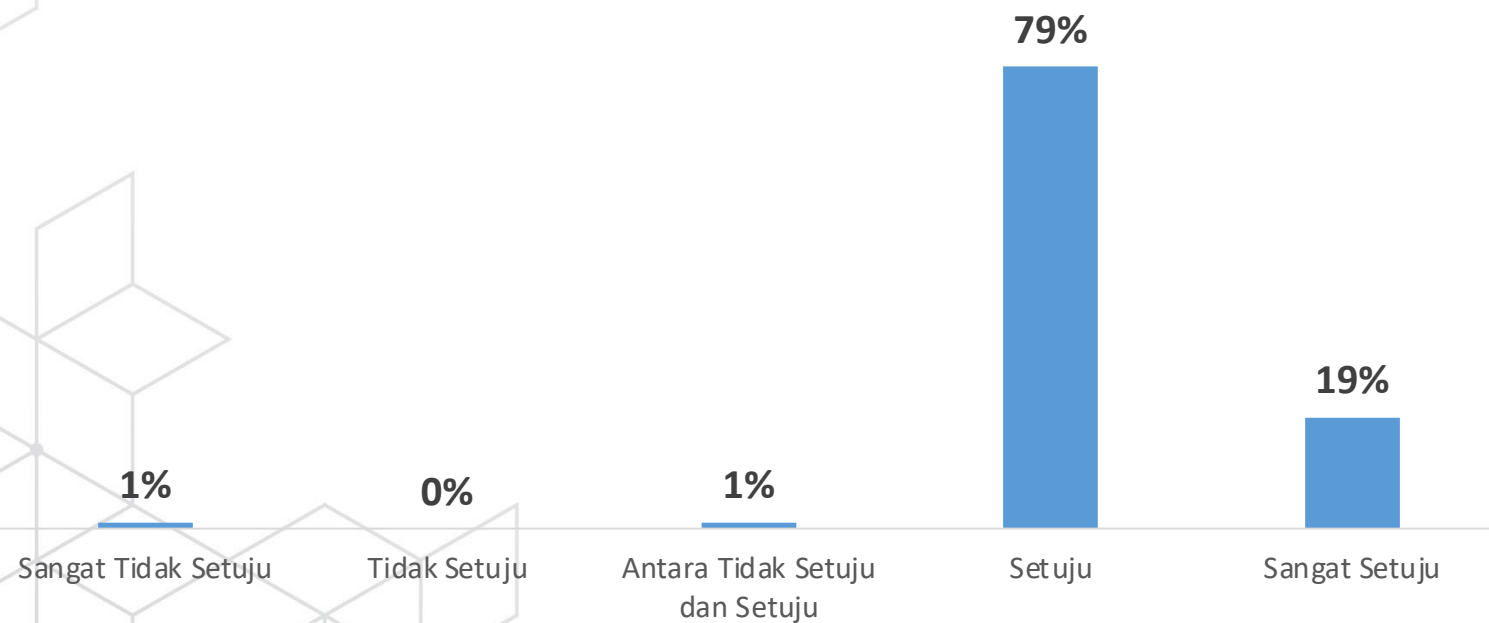
*Pertanyaan *single choice*: responden hanya dapat memilih satu opsi jawaban

Pemahaman filosofi Koperasi – Azas Koperasi

Hampir seluruh responden menyatakan kesetujuannya terhadap filosofi azas Koperasi yang dibangun berdasarkan gotong royong dan kekeluargaan

"Seberapa setujuhkah Anda dengan pernyataan berikut mengenai Koperasi?"

Azas Koperasi dibangun dari semangat gotong royong dan kekeluargaan



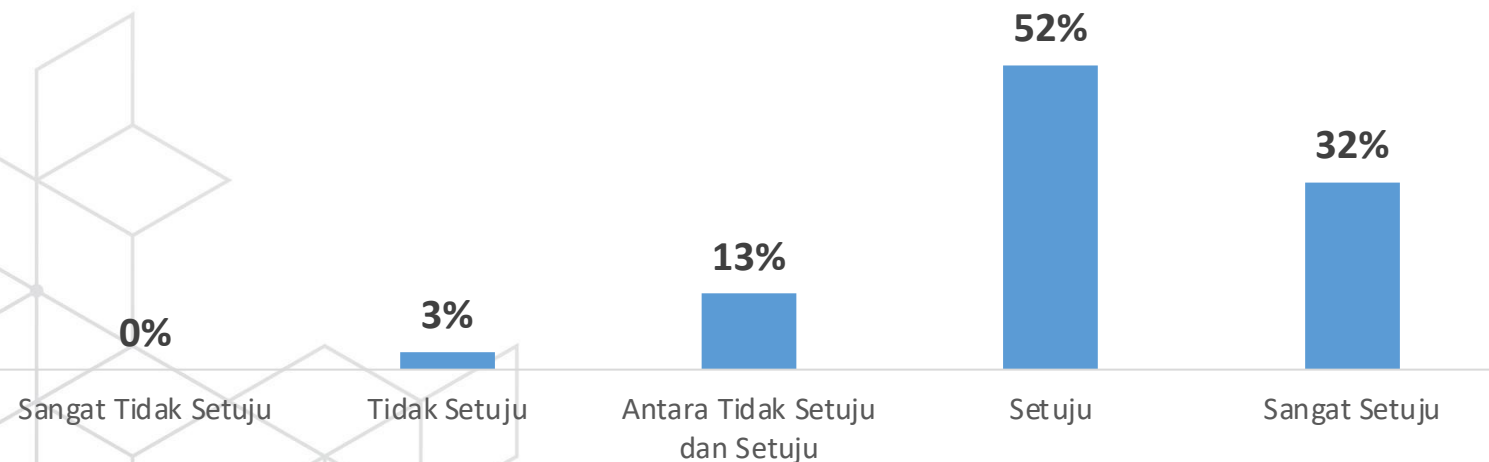
*Pertanyaan *single choice*: responden hanya dapat memilih satu opsi jawaban

Pemahaman filosofi Koperasi – Tata Kelola Koperasi

Pelaksanaan tata kelola Koperasi yang sesuai prinsip dan azas Koperasi mendapatkan respon netral yang paling besar dibandingkan filosofi Koperasi yang lain

"Seberapa setujuhah Anda dengan pernyataan berikut mengenai Koperasi?"

Tata kelola Koperasi secara umum saat ini sudah sesuai dengan prinsip dan azas Koperasi



$n = 155$

*Pertanyaan *single choice*: responden hanya dapat memilih satu opsi jawaban

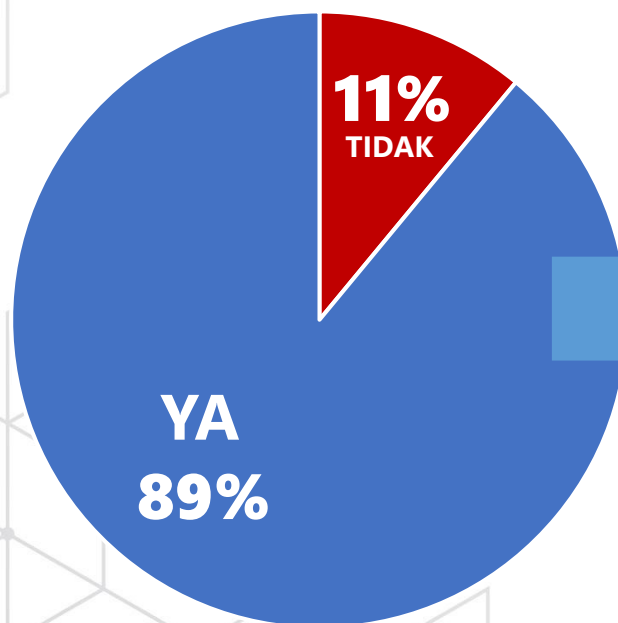
PEMBAHASAN ISU UTAMA



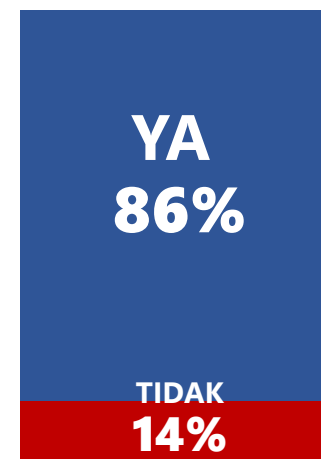
Pengetahuan mengenai isu utama RUU P2SK

Mayoritas responden mengetahui mengenai isu terkait Koperasi dengan adanya RUU P2SK, dan mayoritas responden yang mengetahui isu tersebut juga mengetahui dampaknya terhadap Koperasi, jika RUU tersebut berlaku nantinya

"Apakah Anda mengetahui isu terkait Koperasi dengan adanya RUUP2SK?"



"Apakah Anda mengetahui dampak RUUP2SK terhadap Koperasi?"



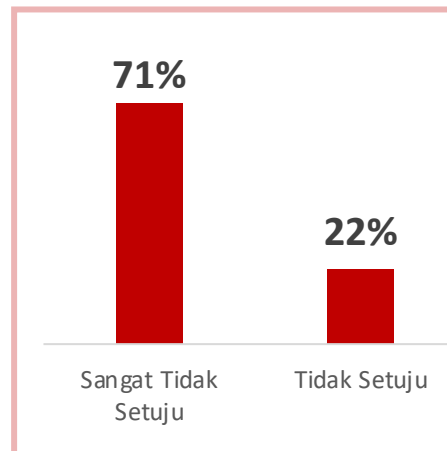
n = 133

*Pertanyaan *single choice*: responden hanya dapat memilih satu opsi jawaban

Sikap terhadap RUU P2SK

Sebagian besar responden menyatakan ketidaksetujuannya terhadap isu pengawasan Koperasi di bawah OJK

"Apakah Anda setuju terhadap Pasal 44A (I) dalam RUU P2SK yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan Koperasi dilakukan oleh OJK?"



"Apa alasan Anda tidak setuju?" $n = 124$

78%

Koperasi seharusnya ada di bawah Kemenkop & UMKM

77%

Tidak sesuai dengan prinsip-prinsip utama Koperasi

75%

Koperasi akan dianggap sebagai suatu lembaga keuangan saja, bukan usaha yang bersifat tolong menolong/ kekeluargaan/kolektif

73%

Koperasi akan kehilangan azas kekeluargaan yang menjadi bangun dasarnya

60%

Tidak sesuai dengan karakteristik usaha Koperasi sebagai usaha mikro dan kecil

*Pertanyaan *single choice*: responden hanya dapat memilih satu opsi jawaban

$n = 133$

0%
Antara Tidak Setuju dan Setuju

3%

Setuju

4%

Sangat Setuju

"Apa alasan Anda setuju?" $n = 9$

56%

Perlu ada pengawasan dari lembaga yang terpercaya yang didukung Undang-Undang

56%

Untuk mengurangi kasus fraud di Koperasi

56%

Agar Koperasi memiliki infrastruktur lembaga penunjang

11%

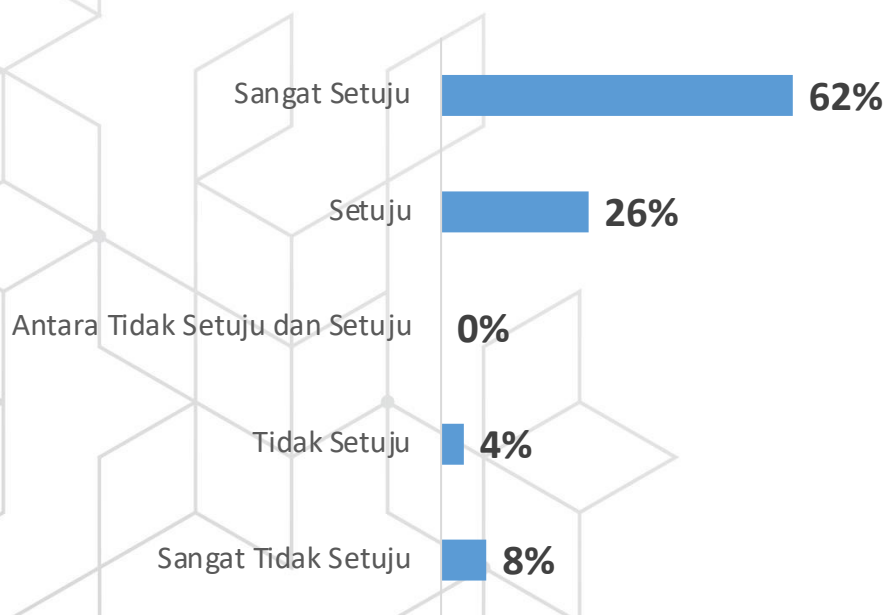
Untuk mewujudkan layanan berbasis keanggotaan

*Pertanyaan *multiple choice*: responden dapat memilih lebih dari satu opsi jawaban

Persepsi keterlibatan unsur Koperasi

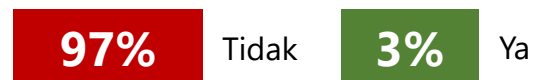
Mayoritas responden menginginkan keterlibatan unsur-unsur Koperasi dalam penyusunan RUU P2SK

"Seberapa setujuh Anda jika pelaku Koperasi dilibatkan dalam penyusunan RUU P2SK?"



*Pertanyaan *single choice*: responden hanya dapat memilih satu opsi jawaban

"Apakah selama ini Anda dilibatkan dalam penyusunan RUU P2SK?"



"Bagaimana menurut Anda model partisipasi yang tepat agar unsur Koperasi dapat dilibatkan dalam penyusunan RUU P2SK?"

- Melibatkan unsur perwakilan Koperasi seperti Forkopin, Perhimpunan BMT Indonesia, Dekopin, asosiasi Koperasi, dll.
- Melibatkan pakar yang ahli dan paham terkait Koperasi, baik akademisi maupun praktisi.
- Melakukan penggalangan opini untuk meminta masukan dan pendapat, seperti survei, Focus Group Discussion, dengar pendapat, benchmarking, dll.
- Duduk bersama antara Pemerintah, DPR, dan pihak Koperasi, baik praktisi, akademisi, asosiasi.

*Pertanyaan terbuka: responden diminta menuliskan jawaban pertanyaan

Persepsi lembaga pengawasan untuk Koperasi

Sebagian besar responden menyatakan bahwa Kemenkop & UKM adalah lembaga yang paling tepat untuk melakukan pengawasan terhadap Koperasi

"Manakah lembaga yang lebih tepat untuk melakukan pengawasan terhadap Koperasi?"

86%



KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

5%



**OTORITAS
JASA
KEUANGAN**

9%

Tidak keduanya

"Mohon jelaskan alasan Anda setuju bahwa Koperasi sebaiknya diawasi oleh Kemenkop & UKM"

- Kemenkop & UKM adalah lembaga yang sudah memahami filosofi, azas, prinsip, dan tata cara pengelolaan Koperasi sehingga diharapkan bisa terus melanjutkan dan fokus untuk menjadi lebih baik.
- Kemenkop & UKM merupakan lembaga yang memang dibuat untuk mewadahi Koperasi.
- Fungsi pengawasan tersebut sudah sesuai dengan UUD 1945.
- Koperasi bukan lembaga keuangan formal, dengan prinsip kekeluargaan, dari anggota untuk anggota.

"Menurut Anda, lembaga apa yang paling tepat mengawasi Koperasi dan mohon jelaskan alasannya"

- Sebuah badan/lembaga/komisi yang berdiri sendiri/bersifat independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, agar terhindar dari kepentingan sesaat, dan karena Koperasi mempunyai karakteristik & filosofi sendiri sehingga diperlukan lembaga yang berisikan SDM yang mengerti tentang Koperasi.

*Pertanyaan terbuka: responden diminta menuliskan jawaban pertanyaan

PREFERENSI LEMBAGA PENUNJANG

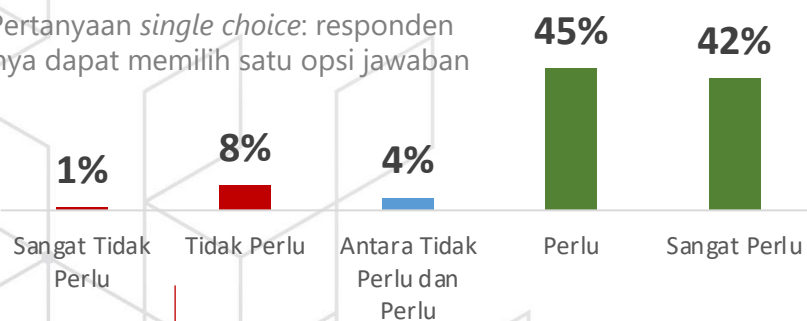


Preferensi Lembaga Pengawas

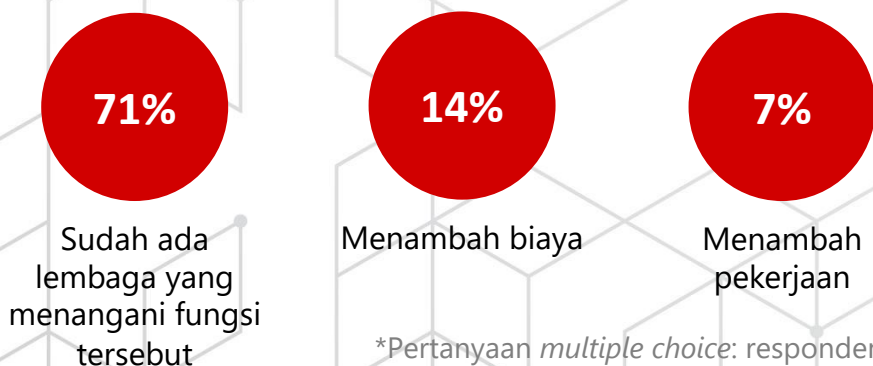
Sebagian besar praktisi Koperasi berpendapat bahwa Koperasi memerlukan sebuah Lembaga Pengawas

"Seberapa perlukah adanya Lembaga Pengawas untuk Koperasi?" $n = 155$

*Pertanyaan *single choice*: responden hanya dapat memilih satu opsi jawaban

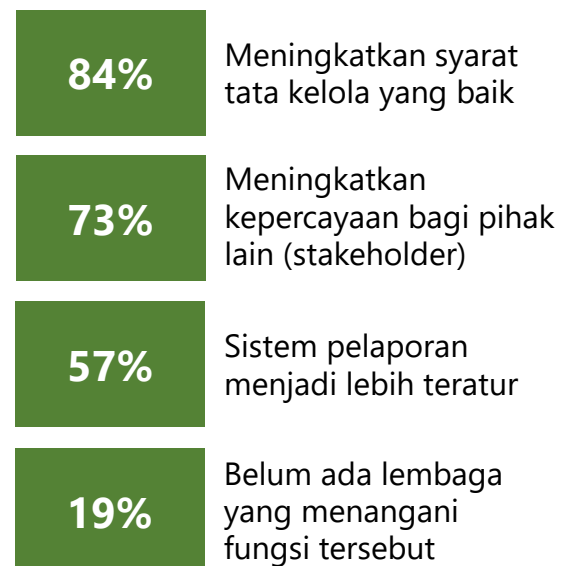


"Apa alasan Anda mengatakan tidak perlu?" $n = 14$



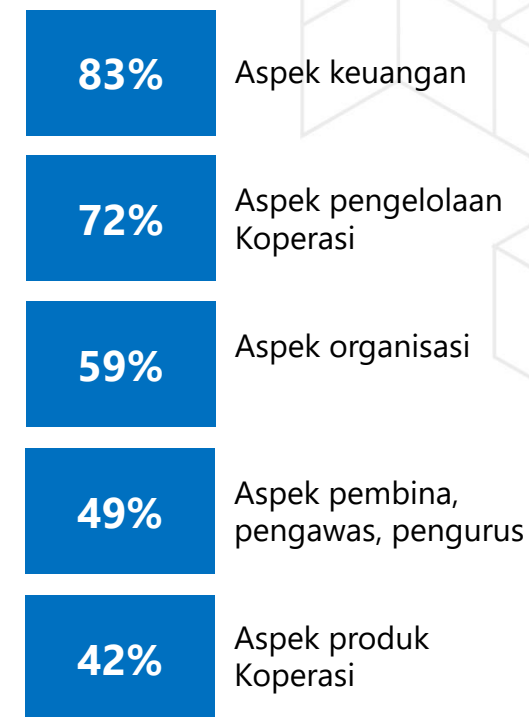
*Pertanyaan *multiple choice*: responden dapat memilih lebih dari satu opsi jawaban

"Apa alasan Anda mengatakan perlu?" $n = 135$



*Pertanyaan *multiple choice*: responden dapat memilih lebih dari satu opsi jawaban

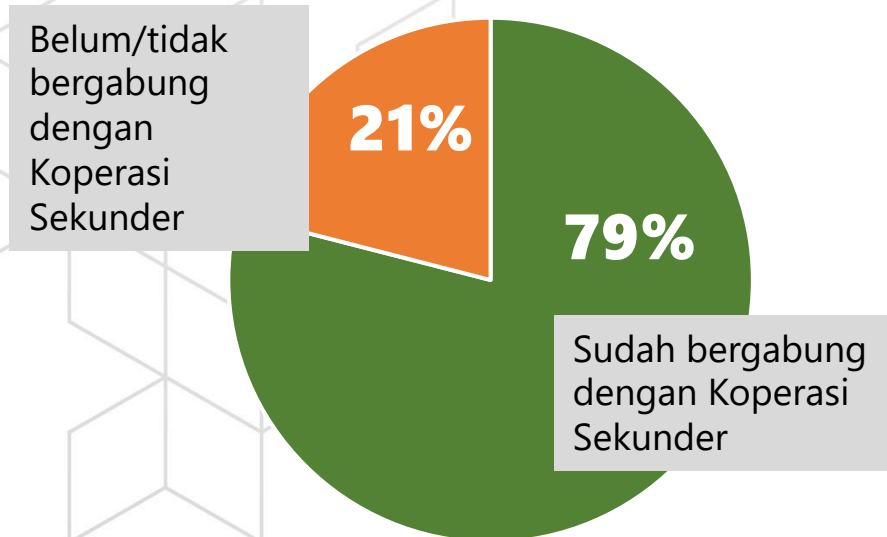
"Bidang apa sajakah yang perlu diawasi?" $n = 135$



Preferensi Lembaga Koperasi Sekunder

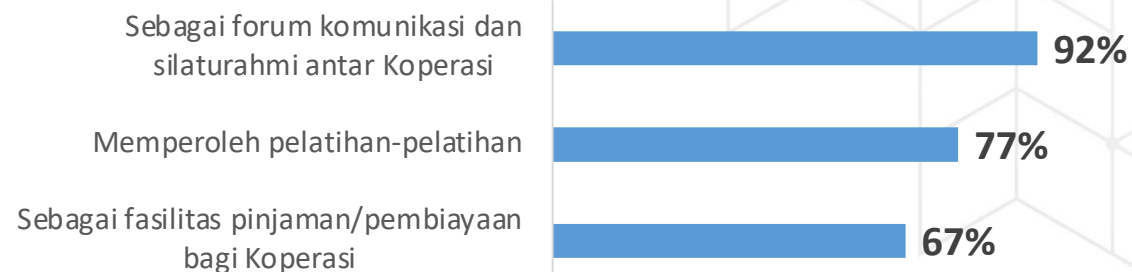
Manfaat Koperasi Sekunder sangat besar dirasakan sebagai forum komunikasi dan silaturahmi

"Apakah Koperasi Anda sudah bergabung dengan Koperasi Sekunder?" $n = 111$



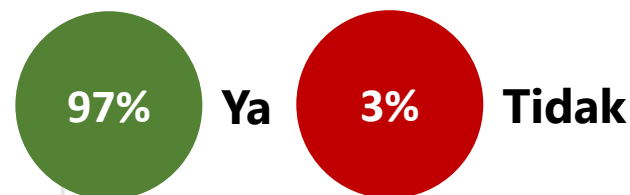
*Pertanyaan *single choice*: responden hanya dapat memilih satu opsi jawaban

"Menurut Anda, apa sajakah manfaat bergabung dengan Koperasi Sekunder?" $n = 88$



*Pertanyaan *multiple choice*: responden dapat memilih lebih dari satu opsi jawaban

"Apakah Koperasi Sekunder tempat Anda bergabung menerapkan peraturan yang sama untuk seluruh anggotanya?"



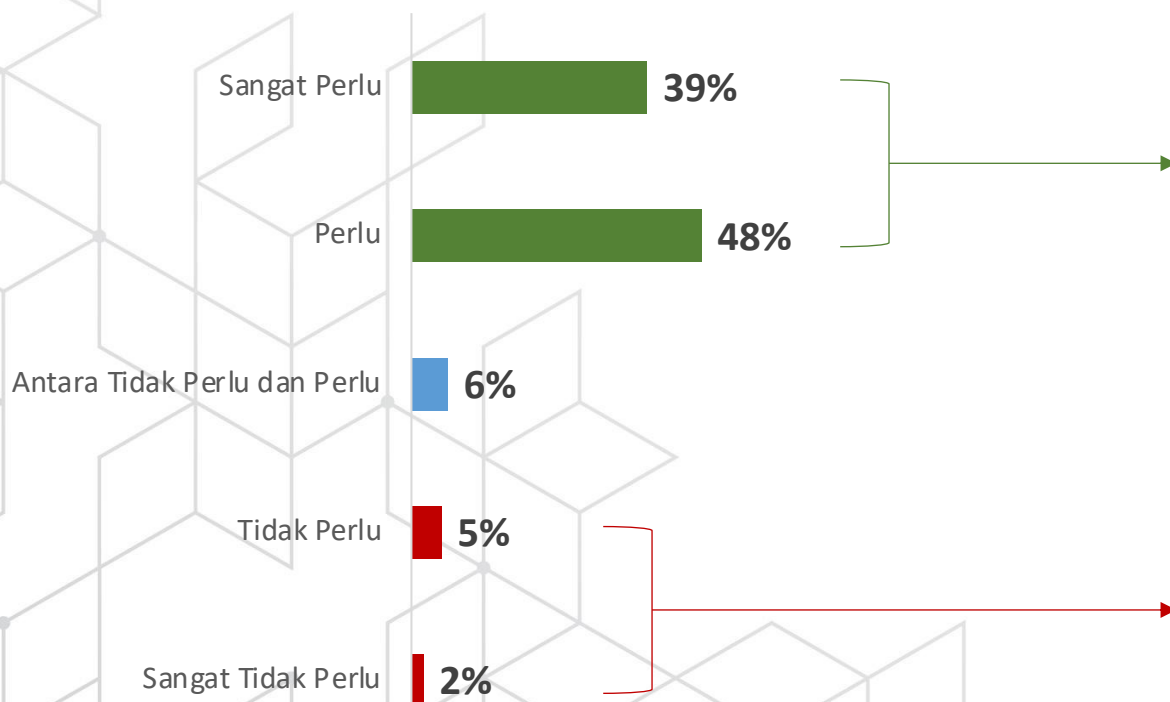
"Apakah Koperasi Sekunder tempat Anda bergabung menetapkan suatu syarat khusus untuk keanggotaannya? (tidak terbuka bagi setiap koperasi di Indonesia)?"



Preferensi Lembaga Penjamin Simpanan

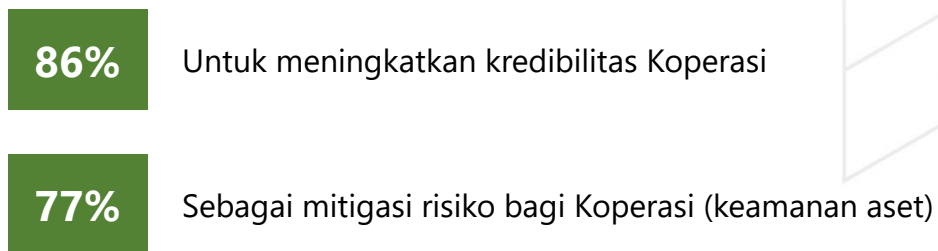
Sebagian besar praktisi Koperasi menyatakan perlunya Lembaga Penjamin Simpanan untuk Koperasi

"Menurut Anda, seberapa perlukah adanya Lembaga Penjamin Simpanan bagi Koperasi?" $n = 111$

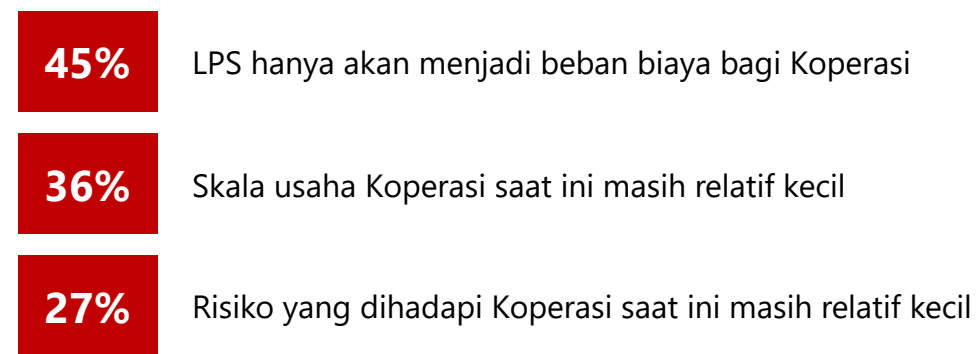


*Pertanyaan *single choice*: responden hanya dapat memilih satu opsi jawaban

"Apa alasan Anda mengatakan perlu? ?" $n = 96$



"Apa alasan Anda mengatakan tidak perlu? ?" $n = 7$

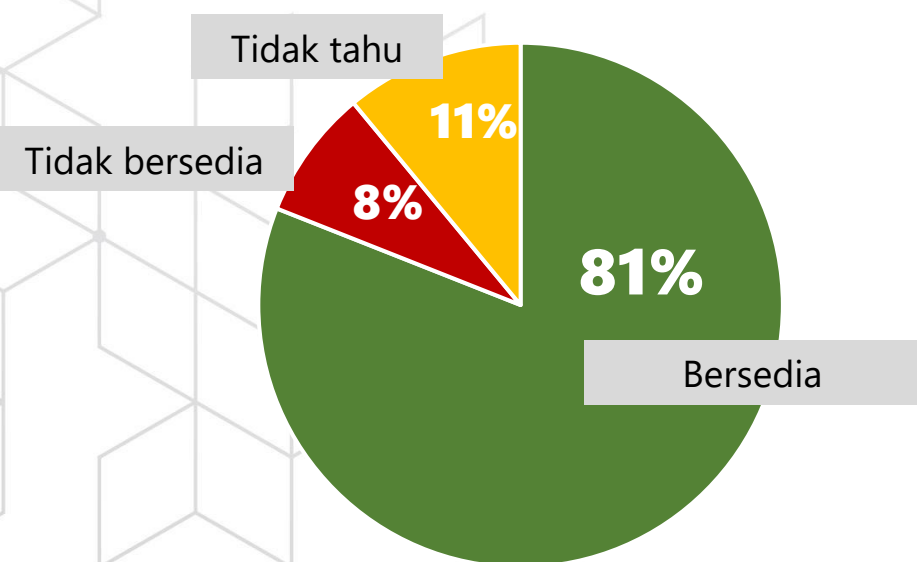


*Pertanyaan *multiple choice*: responden dapat memilih lebih dari satu opsi jawaban

Preferensi Lembaga Penjamin Simpanan

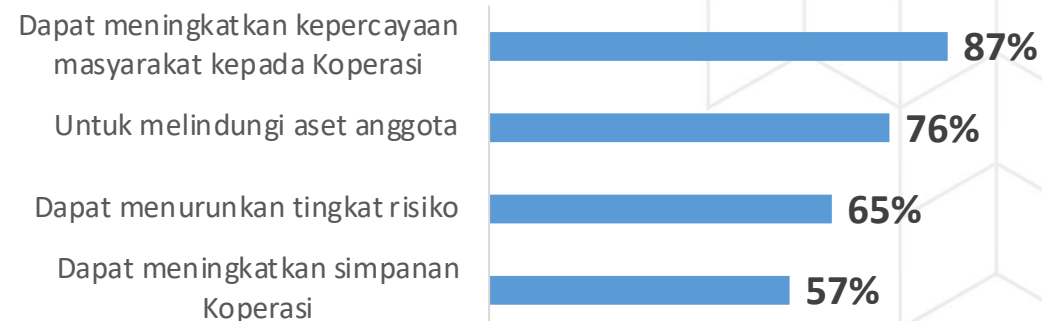
Sebagian besar praktisi Koperasi bersedia untuk menjadi anggota LPS dan membayar premi keanggotaannya

"Apakah Anda bersedia menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan?" $n = 103$



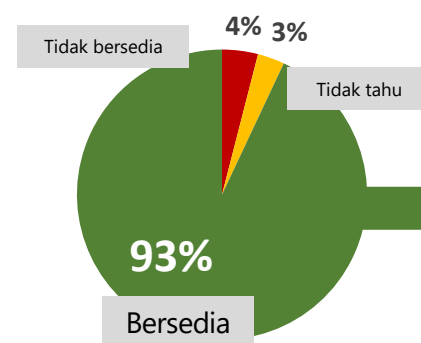
*Pertanyaan *single choice*: responden hanya dapat memilih satu opsi jawaban

"Apa alasan Anda bersedia menjadi anggota LPS?" $n = 83$



*Pertanyaan *multiple choice*: responden dapat memilih lebih dari satu opsi jawaban

"Apa Anda bersedia membayar premi keanggotaan LPS dan bagaimana besarnya?" $n = 83$

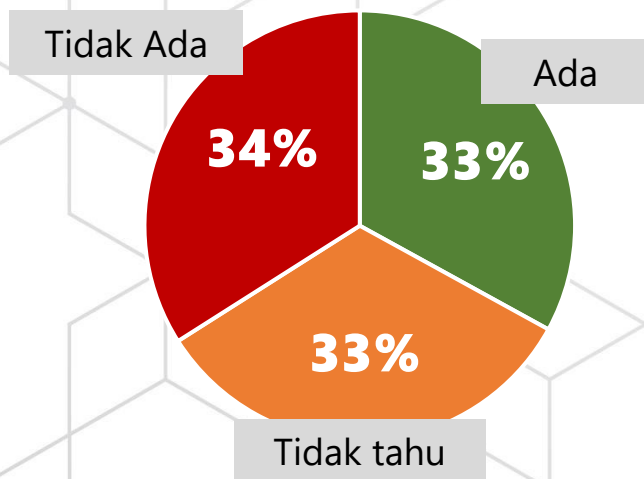


- **61%** nilai premi sebaiknya ditetapkan dalam bentuk persentase terhadap nilai simpanan
- **36%** nilai premi sebaiknya dalam nilai rupiah yang disepakati
- **3%** nilai premi sebaiknya ditetapkan sama dengan premi LPS untuk Perbankan

Preferensi Lembaga Biro Kredit

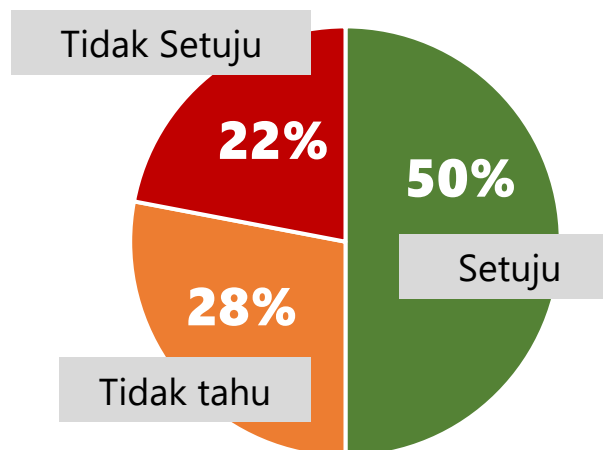
Terdapat perbedaan pengetahuan mengenai lembaga yang dapat memberikan informasi profil risiko, namun setengah dari praktisi Koperasi setuju mengenai perlu adanya Biro Kredit Koperasi

"Apakah menurut Anda saat ini ada lembaga yang dapat memberikan informasi mengenai profil risiko setiap Koperasi?" $n = 111$



*Pertanyaan *single choice*: responden hanya dapat memilih satu opsi jawaban

"Apakah Anda setuju bahwa perlu dibentuk Biro Kredit Koperasi?" $n = 111$



"Menurut Anda, apakah manfaat dari adanya Biro Kredit Koperasi?" $n = 56$

- **84%** menyatakan manfaatnya untuk mengurangi risiko kredit Koperasi.
- **82%** menyatakan manfaatnya untuk mengetahui anggota Koperasi yang memiliki karakter buruk/gagal bayar.

*Pertanyaan *multiple choice*: responden dapat memilih lebih dari satu opsi jawaban

"Apakah Anda bersedia untuk berbagi informasi peminjam kepada Biro Kredit tersebut?" $n = 56$

95%
bersedia

Menyatakan kesediaannya untuk berbagi informasi peminjam kepada Biro Kredit tersebut

5%
Tidak bersedia

Menyatakan tidak bersedia untuk berbagi informasi peminjam kepada Biro Kredit tersebut

KESIMPULAN



Kesimpulan



- Kinerja dan tata kelola Koperasi dalam 1 tahun terakhir dinilai positif oleh praktisi dan pengamat Koperasi. Minimnya pengawasan dilihat bukan sebagai kendala besar, dimana mayoritas merasa puas dengan peran Pemerintah dalam hal ini Kemenkop & UKM dalam menjalankan fungsi-fungsinya seperti pengawasan, pembinaan, dsb.
- Mayoritas responden merasa Koperasi saat ini sudah dijalankan sesuai dengan azas dan filosofis Koperasi baik dalam hal keanggotaan, pengelolaan, dan pembagian SHU.
- Praktisi dan pengamat Koperasi mengetahui isu terkait RUU P2SK dan memahami dampaknya, dimana sikap yang diambil oleh mayoritasnya adalah tidak setuju jika Koperasi ada di bawah OJK dengan alasan tidak sesuai dengan azas, prinsip, filosofi, dan karakteristik Koperasi. Mereka berpendapat bahwa Kemenkop & UKM adalah lembaga yang paling tepat untuk melakukan pengawasan terhadap Koperasi.
- Mayoritas praktisi dan pengamat Koperasi berpendapat perlunya lembaga-lembaga penunjang Koperasi seperti Lembaga Pengawas, Lembaga Koperasi Sekunder, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Lembaga Biro Kredit untuk membawa Koperasi ke arah yang lebih baik lagi.
- Perbaikan dan peningkatan kinerja pengawasan terhadap Koperasi dipandang perlu, namun dengan tetap di bawah Kemenkop & UKM agar azas dan prinsip Koperasi tetap terjaga dengan baik.

Riset ini terselenggara atas kerjasama Trias Politika Strategis (TPS)
dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)

Terima Kasih

